

Judul : Migor banjir pasar, harga akan turun
Tanggal : Rabu, 16 Maret 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Produsen Kudu Dipaksa Migor Banjiri Pasar, Harga Akan Turun



Darmadi Duriyanto

ANGGOTA Komisi VI DPR Darmadi Duriyanto prihatin dengan masih langka dan tingginya harga minyak goreng (migor) di masyarakat. Pemerintah diminta mengendalikan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 30 persen yang diterapkan kepada para produsen maupun perusahaan minyak goreng.

"Selama ini kan Kementerian Perdagangan (Kemendag) nggak pegang kendali fisiknya. Ini jadi problem kelangkaan karena bisa jadi produsen maupun perusahaan hanya memenuhi kewajiban DMO di bawah 30 persen, sebagaimana ditetapkan Pemerintah," kata Darmadi di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, pengendalian dan distribusi yang terukur perlu dilakukan agar kelangkaan minyak goreng saat ini bisa diatasi. Kemendag harus memastikan kewajiban DMO 30 persen itu secara fisik ada, sehingga bisa digunakan untuk memperbanyak stok minyak goreng di pasar. "Begitu produk banjir di pasar, maka harga akan turun," ujarnya.

Hal itu hanya bisa terjadi, lanjutnya, jika Pemerintah memegang kendali penuh DMO yang 30 persen dari produsen dan perusahaan minyak goreng.

Selain itu, Pemerintah bersikap tegas terhadap perusa-

haan minyak goreng nakal yang menjual barangnya ke luar negeri dan enggan mengikuti aturan DMO tersebut.

"Jadi dua langkah ini (DMO fisik dan penegakan hukum) harus dijalankan simultan agar kisruh minyak goreng segera teratasi," pungkasnya.

Sementara, Dosen IPB Prima Gandi menilai, kebijakan Pemerintah menetapkan DMO dan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng pada dasarnya sangat baik. Sayangnya di lapangan, masyarakat masih sulit mendapatkan minyak goreng sesuai harga tersebut.

"Moral hazard pedagang yang tidak mau rugi ketika menjual minyak goreng lebih murah dari harga modal menjadi salah satu penyebabnya," kata Gandi.

Indonesia, lanjut Gandi, pernah tercatat sebagai negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia pada tahun 2015. Saat itu, kelapa sawit menghasilkan lebih dari 31 juta ton CPO (Crude Palm Oil).

Ini menunjukkan bahwa industri kelapa sawit menjadi salah satu sumber penghasil devisa terbesar Indonesia dari sektor non-migas.

Menurutnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tahun lalu menetapkan kelapa sawit sebagai komoditas strategis perkebunan unggulan Indonesia atau Grasida. Namun, perluasan perkebunan kelapa sawit Indonesia mendapat kecaman dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional.

LSM internasional menganggap perkebunan sawit memberikan kontribusi besar terhadap deforestasi, menghasilkan emisi karbon, serta menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati.

"Akibatnya, tersebar luas anggapan bahwa perkebunan kelapa sawit tidak berkelanjutan. Namun saya meyakini kampanye ini tidak semuanya benar," jelas Gandi. ■ KAL